

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Bab ini dikemukakan simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang pada bagian simpulan yang menjelaskan tentang benang merah dalam setiap rumusan masalah setelah di tarik kesimpulan, maka perlu kiranya menjabarkan implikasi dari hasil penelitian yang bisa direkomendasikan terhadap pihak-pihak terkait dengan penulisan ini.

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini berjudul mengenai “ Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”. Lokasi penelitian bertempat di Desa Hu’u Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu - NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Tiga Teknik yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi. Pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui suatu proses yaitu penyusunan, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk menyimpulkan data agar mendapatkan maknanya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam prespektif pendidikan kewarganegaraan sudah berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan. Sehingga mendapatkan hasil output yang sesuai dengan tujuan dan harapan yang diharapkan oleh peneliti.

Perkawinan campuran yang terjadi di desa tersebut adalah masalah-masalah sosial anak sehingga membawa dampak negatif, perkawinan campuran ini cepat ditindak lanjuti agar permasalahan yang sedang terjadi tidak terulang lagi.hal tersebut terjadi karena masyarakat di desa setempat melek akan kebedaraan hukum sehingga terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hal tersebut dibutuhkan terobasan ilmu Pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang tidak melanggar akan adanya aturan dalam suatu negara tindak lanjut yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pemahaman hukum serta ilmu Pendidikan kewarganegaraan

agar masyarakat bisa membuka pikiran karena dalam kehidupan semua tindakan ada hukum yang mengaturnya. dalam perkawinan campuran antara warga negara asing bagian barat atau timur pada hakikatnya adalah sama, di mana mereka adalah warga negara asing yang mempunyai ketertarikan dengan warga Desa Hu'u Kab Dompus NTB. Baik atau buruknya tidak dapat divonis untuk satu pihak. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama, sehingga jika perkawinan campuran yang dilakukan dengan warga negara asing bagian timur dianggap lebih baik dari pada warga negara asing bagian barat. Perkawinan campuran di Desa Hu'u dianggap tidak baik atau lebih baik untuk dihindari karena, dalam realitas yang ada, bahwa pasangan yang melakukan perkawinan campuran sangat dangkal terhadap pemahaman agama, sehingga masyarakat khawatir jika perkawinan tersebut dapat menggoyahkan keyakinan mereka. Pasangan perkawinan campuran hendaknya memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Dengan diberlakukan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka anak dari hasil perkawinan campuran dapat memanfaatkan ketentuan untuk melegalkan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara baik terutama hak istri dan anak.

Melihat permasalahan yang terjadi di Lokasi penelitian bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah atau kontrak/sirih sehingga terjadi perceraian dan tinggalkan begitu saja hal tersebut membawa dampak negatif dan mempengaruhi Status hukum dan Sosial terhadap anak dimana sampai sekarang anak dari hasil perkawinan tersebut mengalami degradasi mental sehingga merusak moral dan perilaku anak karena anak dari hasil perkawinan tersebut sampai sekarang kurang perhatian baik dari pemerintah dan lingkungan masyarakat setempat sehingga anak tidak mendapatkan pelayanan yang layak untuk kesejahteraan hidup seperti anak yang lainnya hal tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua, pemerintah dan lingkungan masyarakat setempat, dari permasalahan yang dihadapi oleh anak dan subjek sudah seharusnya permasalahan seperti ini dapat terselesaikan dengan cepat sehingga anak bisa mendapatkan kedudukannya dan

hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia karena anak merupakan karunia Tuhan yang harus di lindungi.

Dari perkawinan campuran yang tidak tercatat antara dua kewarganegaraan yang berbeda dapat mempengaruhi Status asal Anak karena perkawinan yang dilakukan secara kontrak atau sirih sehingga di tinggalkan begitu saja hal tersebut membawa dampak negatif terhadap anak yang ditinggalkan anak tersebut belum mempunyai status kewarganegaraan yang jelas.

Terkait dengan perlindungan hukum dalam perkara ini dapat menggunakan perlindungan dua bentuk hukum yaitu represif dengan adanya peran pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dimana ketiga elemen tersebut dapat membantu untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di desa dengan terjadinya perkawinan campuran di desa tersebut bentuk perlindungan hukum preventi fdimana melihat dari permasalahan yang sedang terjadi harus adanya sebuah tindakan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan campuran di desa setempat karena dari perkawinan yang dilakukan dapat merugikan diri sendiri, anak, lingkungan sosial hal tersebut . Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab III Pencegahan Perkawinan Pasal 13 berbunyi, Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan

siatuasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan.

Upaya perlindungan hukum melalui peran dan upaya pemerintah harus disusun pendekatan dan pendampingan terhadap para subjek dan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat harus terstruktur dan komperensif, hal ini dikarenakan pendekatan dan pendampingan para pelaku dan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat perlu persiapan yang khusus dan terinci sehingga kegiatan pendekatan dan pemberi pendampingan dan solusi dengan baik. Proses pendekatan, pendamping dan pemberian solusi dari pemerintah dilakukan melalui beberapa kegiatan dan tindakan yaitu: tindakan rutin, kegiatan spontan dan kegiatan terprogram dan terencana. Dari permasalahan yang dihadapi oleh subjek dan anak hasil perkawinan campuran harus bisa melaporkan diri kepada pemerintah dan masyarakat setempat agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan berbagai tindakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah desa setempat karena permasalahan ini tidak bisa diatasi secara individual harus melibatkan banyak pihak seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, Tokoh agama sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat.

## **5.2 Implikasi**

Melihat hasil temuan yang dilakukan oleh penelitian, pembahasan penelitian, dan simpulan diatas dapat dirumuskan beberapa implikasi tersebut: berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di dapat maka, implikasi penelitian tentang Mengapa terjadinya perkawinan campuran yang tidak tercatat dan bagaimana upaya pemerintah setempat dan masyarakat melalui pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dan perlindungan hukum kepada status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat di Desa Hu'u dapat memperluas pengertian para subjek dan anak hasil perkawinan campuran tentang betapa

pentingnya status perkawinan campuran tentang kewarganegaraan dan status hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di setiap kehidupan sehari-hari.

Perencanaan pendekatan dan pendampingan subjek dan anak hasil perkawinan campuran melalui peran dan upaya pemerintah di Desa Hu'u yang berimplikasi pada proses dan upaya pemerintah dalam memberikan dan menjalankan pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dalam upaya perlindungan hukum tanpa adanya sebuah perencanaan dan tindakan pendekatan dan pendampingan yang benar dan sesuai dengan proses, bahkan hasilnya pun tidak akan diperoleh. Hal ini juga memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kepada kita tentang tujuan dan fungsi dan peran tentang pentingnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 serta upaya dan perlindungan hukum yang sesuai dengan pelaksanaan dalam kehidupan.

a. Proses pelaksanaan pendampingan, pemberian motivasi, dan perhatian dari pemerintah setempat dan masyarakat yang berimplikasi pada para subjek dan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat menjadi bekal dan harapan dalam kehidupan mereka selanjutnya, setelah mereka menerima semua proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan masyarakat melalui program kegiatan dan perencanaan, pendekatan serta bantuan yang akan diberikan.

b. Upaya dan Peran dari pemerintah setempat dan masyarakat. dalam menyelesaikan masalah status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat diperlukan sinergitas yang seimbang dan sejalan antara pemerintah setempat dan masyarakat dan para subjek supaya dapat mewujudkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para subjek dan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat sehingga mendapatkan apa yang diharapkan melalui pendekatan, motivasi dan bantuan agar masalah terselesaikan agar para subjek dan anak dari keluarga perkawinan campuran menjadi seorang warga negara yang baik. Dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

c. Implikasi lain yang didapatkan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa yang sangat terlihat jelas adalah upaya dan peran pemerintah setempat (Desa) dalam menyelesaikan masalah “Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Belum Tercatat” semakin hari jauh lebih baik terutama dalam pendekatan dan motivasi serta bimbingan bagi mereka (subjek dan anak). Hal tersebut terbukti dengan perencanaan pendekatan, pendampingan dan pemberian solusi serta pandangan yang berlanjut setiap waktu dalam proses dan tindakan yang di ambil dalam menyelesaikan masalah- masalah yang ada demi kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan terjadinya perkawinan campuran di desa tersebut, terdapat bentuk perlindungan hukum preventif dimana melihat dari permasalahan yang sedang terjadi harus ada sebuah tindakan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan campuran di desa setempat karena dari perkawinan yang dilakukan dapat merugikan diri sendiri, anak, dan lingkungan sosial. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab III Pencegahan Perkawinan Pasal 13 berbunyi, Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### **5.4 Rekomendasi**

Memperhatikan hasil analisis dan simpulan penelitian sebagaimana dijelaskan terdahulu maka, penulis menyampaikan beberapa Rekomendasi kepada pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

##### **1) Pada Pemerintah Desa Hu,u Kab. Dompu NTB**

Berdasarkan hasil penelitian yang temukan di harapkan agar pemerintah berperan dan bertindak cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi demi kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melihat permasalahan yang sedang

banyak terjadi diharapkan pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan dibuat suatu peraturan daerah guna untuk kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sekitar menghargai adanya suatu aturan yang ada di negara Indonesia tugas pemerintah dalam melihat permasalahan yang sedang terjadi bagaimana caranya masyarakat bisa hidup sejahtera karena permasalahan yang sedang banyak terjadi karena ketidaksejahteraan masyarakat sehingga mereka membuat suatu tindakan yang membawa dampak negative hal tersebut harus benar-benar di tindaklanjuti demi menyelamatkan kesejahteraan manusia Serta menjaga warisan budaya bangsa Indonesia.

#### 2) Pada Tokoh Agama

Diharapkan terus memberikan solusi dan pandangan terhadap masyarakat agar masyarakat setempat bisa mengambil tindakan yang baik untuk kesejahteraan hidupnya agar tidak membuat masalah yang merugikan diri sendiri dan banyak pihak. Serta membuat suatu kegiatan keagamaan agar masyarakat diberi pemahaman serta sehingga masyarakat bisa menjalani hidup yang sesuai dengan tujuan hidupnya.

#### 3) Pada masyarakat

Diharapkan masyarakat tetap menaati ketentuan hukum yang berlaku karena negara Indonesia negara yang berdasarkan pada hukum apabila kita melanggar maka bisa merugikan diri sendiri dan orang banyak melihat permasalahan yang sering terjadi.

#### 4) Pada generasi muda

Perlu memberikan perhatian, partisipasi dan apresiasi lebih untuk menjaga dan melestarikan desa agar tidak terjerumus kedalam masalah yang sama karena kalian sebagai generasi penerus bangsa dan negara.

#### 5) Kepada Peneliti Lanjutan

Peneliti selanjutnya bisa meneliti dan menggali permasalahan yang lebih mendalam lagi masalah Status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif pendidikan di Desa Hu'u Kab. Dompus NTB serta mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat.

